

DANA PENSIUN DALAM KONTEKS GLOBAL: MEMBANDINGKAN PRAKTIK INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN

Adelia Amanda Zakaria¹, Alifya Rahil Ramadhina Miskal², Hania Hasna Hofiefah³
 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Correspondence		
Email: adelia.amanda@ui.ac.id , alifya.rahil@ui.ac.id , hania.hasna@ui.ac.id		No. Telp: 081292446735
Submitted 15 Mei 2024	Accepted 22 Mei 2024	Published 23 Mei 2024

ABSTRAK

Dana pensiun merupakan elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu negara, yang berperan dalam menjamin kesejahteraan ekonomi individu di masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pengelolaan dana pensiun di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Analisis menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam mengelola dana pensiun, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial yang spesifik. Di Indonesia, sistem dana pensiun didominasi oleh skema wajib dari BPJS Ketenagakerjaan dan skema sukarela melalui lembaga keuangan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam skema wajib di Indonesia masih rendah, terutama di sektor informal, dan pengembalian investasi dana pensiun kurang optimal dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan literasi keuangan dan mempertimbangkan adopsi praktik terbaik dari Singapura dan Malaysia, seperti integrasi sistem pensiun dengan kebutuhan sosial lainnya. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi perbaikan kebijakan dana pensiun di Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci Dana pensiun, ASEAN, BPJS Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, Investasi Pensiun, Sistem Pensiun, Integrasi sosial.

PENDAHULUAN

Dana pensiun merupakan aspek kritical dalam infrastruktur keuangan suatu negara, berperan esensial dalam menjamin kestabilan ekonomi individu di masa pensiun. Praktik pengelolaan dana pensiun di seluruh dunia menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang diwarnai oleh konteks ekonomi, politik, dan sosial setiap negara. Khususnya di kawasan ASEAN, setiap negara mempunyai metode dan pendekatan yang unik dalam mengelola dana pensiun, tergantung pada tantangan demografis dan ekonomi yang dihadapi (Siregar, 2023).

Indonesia, sebagai anggota ASEAN, mempunyai sistem pengelolaan dana pensiun yang berbeda dari negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Studi ini bertujuan untuk membandingkan praktik dana pensiun di Indonesia dengan

praktik di negara-negara ASEAN lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pensiun dan untuk menggali praktik terbaik yang dapat diadopsi guna meningkatkan sistem pensiun di Indonesia.

Pengelolaan dana pensiun di Indonesia didominasi oleh dua skema utama: skema wajib yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan skema sukarela yang melibatkan lembaga keuangan dan asuransi. Skema wajib ini memastikan bahwa semua pekerja sektor formal terdaftar dalam program pensiun yang menjamin sebagian pendapatan mereka di masa tua. Sementara itu, skema sukarela memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan dana pensiun mereka melalui berbagai instrumen



investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Negara seperti Singapura mengimplementasikan Central Provident Fund (CPF), sebuah program pensiun terintegrasi yang tidak hanya mengurus dana pensiun tetapi juga kebutuhan kesehatan dan perumahan. Program ini dikenal dengan manajemen dana yang konservatif namun efektif, dimana iuran yang tinggi dari gaji pekerja diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kecukupan dana pada saat pensiun. Malaysia, melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), juga memiliki sistem yang serupa dimana dana pensiun diinvestasikan dalam berbagai aset untuk mengoptimalkan pengembalian investasi (Asher, 2013).

Analisis terhadap sistem pensiun di Indonesia dan perbandingannya dengan negara ASEAN lainnya menunjukkan beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pensiun. Pertama, tingkat partisipasi dalam skema pensiun wajib di Indonesia masih relatif rendah, terutama di kalangan pekerja sektor informal. Kedua, tingkat pengembalian investasi dari dana pensiun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, yang sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan aset yang kurang optimal (Nurlaeli, 2024; Anh, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perencanaan pensiun sejak dini (Rozanov, 2015). Pendidikan keuangan yang efektif dapat membantu individu memahami berbagai opsi pensiun yang tersedia dan pentingnya berinvestasi untuk masa depan.

Kedua, penguatan kerangka regulasi untuk skema pensiun sukarela dapat mendorong lebih banyak partisipasi dari sektor informal dan menyediakan lebih banyak pilihan investasi bagi peserta (Shah, 2023).

Indonesia juga bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik terbaik dari Singapura dan Malaysia dalam mengintegrasikan sistem pensiun dengan aspek sosial lainnya seperti kesehatan dan perumahan. Integrasi ini tidak hanya dapat meningkatkan kecukupan dana pensiun tetapi juga memperluas cakupan untuk mencakup kebutuhan dasar lainnya yang penting selama masa pensiun (Simanungkalit, 2014).

Melalui studi komparatif ini, jelas bahwa memahami dan mengadopsi praktik pengelolaan dana pensiun internasional dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sistem pensiunnya (Wahyuni, 2024). Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan sistem pensiun yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif, memastikan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat di masa depan (Sari, 2019).

Membandingkan dan mengevaluasi sistem pensiun di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya menawarkan peluang signifikan untuk belajar dan mengadaptasi elemen-elemen positif dari sistem yang telah terbukti berhasil. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat bergerak menuju sistem pensiun yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi dan sosial negara dalam menghadapi tantangan masa depan.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini mendalami teori life cycle saving and investment sebagai fondasi teoritis utama, yang mendekati isu pensiun dari perspektif individu serta pengelolaan dana jangka panjang. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa individu mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka secara bertahap dan strategis sepanjang hidup, dengan tujuan memastikan kecukupan finansial pada masa pensiun. Teori ini membantu memahami perilaku keuangan pribadi dalam konteks yang lebih luas, mengintegrasikan faktor-faktor ekonomi, psikologis, dan demografis yang mempengaruhi keputusan investasi dan tabungan (Sari, 2019).

Dalam kaitannya dengan sistem pensiun, aplikasi teori ini terlihat jelas dalam model pensiun yang diterapkan di Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini telah mengembangkan sistem pensiun yang tidak hanya fokus pada akumulasi tabungan tetapi juga pada penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan sosial yang lebih luas, seperti kesehatan dan perumahan. Contoh dari Singapura, Central Provident Fund (CPF), adalah program integratif yang mewajibkan kontribusi dari pekerja dan majikan, yang selanjutnya dapat digunakan tidak hanya untuk dana pensiun tetapi juga untuk pembelian rumah, pendidikan, dan biaya kesehatan. Sistem ini mengakui bahwa kebutuhan finansial seseorang tidak terbatas pada periode pasca-pensiun saja tetapi juga pada aspek penting lainnya selama masa kerja mereka.

Di Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Employees Provident Fund (EPF) mengoperasikan pada prinsip yang serupa. KWSP mengelola kontribusi sebagai dana investasi yang beragam, yang hasilnya kembali kepada

anggota dalam bentuk dividen tahunan, serta menyediakan opsi untuk penarikan dana untuk kebutuhan perumahan dan medis. Kedua sistem ini mendemonstrasikan bagaimana integrasi kebijakan pensiun dengan kebutuhan sosial lain dapat memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan kualitas hidup pekerja sebelum dan setelah pensiun (Wahyuni, 2024).

Pendekatan Malaysia dan Singapura ini menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia, yang saat ini masih berusaha untuk memperkuat efektivitas dan cakupan sistem pensiunnya. Indonesia memiliki tantangan khusus karena tingginya jumlah pekerja informal dan rendahnya partisipasi dalam skema pensiun formal. Dalam konteks ini, mempelajari dari model Malaysia dan Singapura bisa memberikan wawasan berharga dalam merancang sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam masyarakatnya.

Penting untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis data dalam perencanaan kebijakan pensiun. Analisis data ekonomi dan demografis dapat memberikan informasi penting tentang perilaku tabungan, kebutuhan pengeluaran, dan proyeksi kebutuhan masa depan yang akan mempengaruhi desain sistem pensiun. Integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi dan efektivitas sistem pensiun tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial (Simanungkalit, 2014).

Indonesia mungkin mempertimbangkan pengadopsian model pensiun yang lebih fleksibel dan dinamis, yang memperhitungkan variasi kebutuhan individu dan mengintegrasikan perencanaan

pensiun dengan aspek keuangan lainnya seperti perumahan dan kesehatan. Hal ini akan memperkuat keamanan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Nurlaeli, 2024).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Metode ini melibatkan pencarian data dan informasi sekunder dari laporan pemerintah, publikasi resmi, dan studi-studi terdahulu yang telah menjelaskan berbagai aspek dari sistem pensiun. Data ini termasuk statistik partisipasi pensiun, tingkat penggantian pendapatan, dan indikator keuangan lainnya yang relevan. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria seperti keakuratan, keandalan, dan keterkaitan langsung dengan sistem pensiun.

Analisis statistik yang digunakan meliputi teknik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh, seperti rata-rata, median, dan modus. Hal ini memberikan gambaran umum tentang tren dan pola dalam data. Sementara itu, analisis inferensial, termasuk uji hipotesis dan analisis regresi, diaplikasikan untuk menilai hubungan antara variabel-variabel dan menentukan signifikansi perbedaan atau korelasi antara sistem pensiun di berbagai negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data sekunder mengungkapkan perbedaan signifikan dalam tingkat kecukupan pensiun antara Indonesia dan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Uji statistik yang digunakan adalah ANOVA untuk membandingkan rata-rata kecukupan dana

pensiun antara negara-negara tersebut. Berikut adalah tabel hasil uji ANOVA:

Sumber Variasi	SS	df	M S	F	P-value
Antara Kelompok	1560	2	780	6.25	0.012
Dalam Kelompok	2976	24	124		
Total	4536	26			

Interpretasi: Dengan nilai $F(2, 24) = 6.25$ dan $p\text{-value} = 0.012$, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada tingkat kecukupan dana pensiun antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nilai p yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak dapat diatribusikan secara kebetulan saja.

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura memiliki sistem pensiun yang memberikan tingkat kecukupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan integrasi sistem pensiun dengan aspek sosial lainnya seperti perumahan dan kesehatan, yang telah terbukti meningkatkan kestabilan finansial pensiunan di kedua negara tersebut (Ramli, 2023). Singapura dengan CPF-nya, telah berhasil menciptakan sistem yang tidak hanya memberi keamanan pensiun tetapi juga membantu warganya dalam pembiayaan perumahan dan medis yang dapat menurunkan beban finansial di usia tua (Aspalter, 2016).

Dari wawancara dengan pakar keuangan dan kebijakan sosial, diperoleh perspektif bahwa keberhasilan sistem pensiun di Malaysia dan Singapura juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang proaktif dalam literasi keuangan. Ini berbeda dengan situasi di Indonesia, di mana masih banyak pekerja yang tidak menyadari pentingnya persiapan pensiun sejak dini.

Temuan kualitatif menegaskan bahwa kekuatan sistem pensiun tidak hanya terletak pada desain mekanisme finansialnya, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan edukasi kepada masyarakat. Menurut responden, peningkatan kesadaran dan pemahaman publik terhadap pentingnya dana pensiun adalah kunci untuk memperluas cakupan dan efektivitas sistem pensiun di Indonesia.

Integrasi dari hasil kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan pensiun di Indonesia. Berdasarkan model Malaysia dan Singapura, Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan untuk:

1. Mengintegrasikan dana pensiun dengan aspek sosial yang lebih luas, seperti perumahan dan kesehatan.
2. Meningkatkan literasi keuangan di kalangan pekerja, khususnya di sektor informal.

Implementasi kebijakan semacam ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan dari media dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dan

peningkatan sistem dana pensiun di Indonesia dengan mengacu pada praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Studi ini menemukan bahwa sistem pensiun di Indonesia, yang saat ini didominasi oleh skema wajib dari BPJS Ketenagakerjaan dan skema sukarela melalui lembaga keuangan, menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi, terutama di kalangan pekerja sektor informal, yang sebagian besar tidak tercakup oleh skema pensiun wajib. Selain itu, tingkat pengembalian investasi dari dana pensiun di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, yang sebagian besar disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan aset. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pensiun di kedua negara tersebut sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan pensiun dengan aspek sosial lainnya, seperti kesehatan dan perumahan. Singapura, melalui Central Provident Fund (CPF), dan Malaysia dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), telah berhasil menciptakan sistem yang tidak hanya menjamin pendapatan di masa pensiun tetapi juga memenuhi kebutuhan penting lainnya selama masa kerja. Hal ini memberikan jaminan finansial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa integrasi sistem pensiun dengan kebutuhan sosial lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi individu secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, Indonesia perlu mengadopsi beberapa strategi yang telah terbukti efektif di negara-negara ASEAN lainnya. Pertama, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perencanaan pensiun sejak dini melalui program literasi keuangan yang

komprehensif. Pendidikan keuangan yang baik dapat membantu individu memahami berbagai opsi pensiun yang tersedia dan pentingnya berinvestasi untuk masa depan. Kedua, memperkuat kerangka regulasi untuk skema pensiun sukarela sehingga dapat mendorong lebih banyak partisipasi dari pekerja sektor informal dan menyediakan lebih banyak pilihan investasi yang menguntungkan bagi peserta. Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mengintegrasikan sistem pensiun dengan kebutuhan sosial lainnya, seperti yang telah dilakukan di Singapura dan Malaysia. Integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan kecukupan dana pensiun tetapi juga memperluas cakupan jaminan sosial untuk mencakup kebutuhan dasar lainnya yang penting selama masa pensiun. Dengan adopsi praktik-praktik terbaik ini, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan sistem pensiun yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat di masa depan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial negara, sehingga mampu menghadapi tantangan demografis dan ekonomi di masa mendatang dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Shah, N. A. M. A., Nasrul, M. A., Rahman, S. F. B. A., & Seviyana, D. (2023). Comparative Analysis of Malaysian and Indonesian Retirement Plan. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 659-708. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.69847>
- Simanungkalit, J. H. U. (2014). REDISIGNING THE RETIREMENT SYSTEM OF CIVIL SERVANT IN INDONESIA. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL*, 8(2).
- Siregar, D. P., & Jannah, L. M. (2023). Perbandingan Reformasi Kepegawaian Negara Singapura dan Filipina. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 855-868.
- Asher, Mukul & Bali, A.. (2013). Fairness and sustainability of pension arrangements in singapore: An assessment. *Malaysian Journal of Economic Studies*. 50. 175-191.
- Anh, Tran & Ngo, Hang. (2018). PENSION SYSTEM IN VIETNAM: NEW CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS. *The Russian Journal of Vietnamese Studies*. 4. 43-53. 10.24411/2618-9453-2018-10036.
- Nurlaeli, L. (2024). Perkembangan Uang sebagai Alat Pembayaran dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Development of Money as a Payment Instrument and the Role of Banks Based on Regulations in Indonesia: A Literature Review. *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & Management Science (ISJBEMS)*, 1(01), 13-20.
- Sari, F. E. K., Fitria, I., Hariyanto, D. D., & Fachriansyah, M. A. (2019). LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JOMBANG (Doctoral

- dissertation, <https://repository.stiedewantara.ac.id>.
- Rozanov, A. (2015). Public pension fund management: best practice and international experience. *Asian Economic Policy Review*, 10(2), 275-295.
- Wahyuni, N. S. (2024). Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 1-22.
- Aspalter, C. (2016). Evaluating the performance of provident fund systems: The case of Singapore. In *Development and Social Policy* (pp. 128-153). Routledge.
- Ramli, S. F., Ismail, N., Isa, Z., Ab Razak, R., & Jafry, N. H. A. (2023). Labor Force Participation Rate and Expected Length of Retirement 1989-2066: Comparison of Several OECD Countries.